

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA MAGELANG

2025

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH
JL. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Magelang 56101
Telp. (0293) 363646, Website : inspektoratmagelangkota.go.id;
Email : inspektoratmlkota@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2025.

Rencana Kerja 2025 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2025 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Magelang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Magelang, serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun ke depan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Magelang, 5 Agustus 2024
INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG



LARSITA S.E., M.Sc. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	94
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD	99
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	108
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	109
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	109
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	113
3.3 Program dan Kegiatan	113
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	116
4.1. Tujuan dan Sasaran	116
4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025	116
4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2025	117
BAB V PENUTUP	121
5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	7
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang	11
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021, 2022 & 2023	16
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang	18
Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang	24
Tabel 2.6 Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang	30
Tabel 2.7 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023	31
Tabel 2.8 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023	31
Tabel 2.9 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023	32
Tabel 2.10 Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas, Evaluasi implementasi SAKIP	33
Tabel 2.11 Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	34
Tabel 2.12 Capaian Tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang	35
Tabel 2.13 Hasil Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP Terintegrasi) Tahun 2023	35
Tabel 2.14 Capaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang	38
Tabel 2.15 Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang	41
Tabel 2.16 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	42
Tabel 2.17 Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang	42
Tabel 2.18 Hasil QA Kapabilitas APIP Tahun 2023	43

Tabel 2.19 Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang	49
Tabel 2.20 Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang	52
Tabel 2.21 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang	82
Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023	83
Tabel 2.23 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2024	86
Tabel 2.24 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023	88
Tabel 2.25 Reviu Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Kota Magelang Tahun 2025	102
Tabel 2.26 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Magelang Tahun 2025	109
Tabel 3. 1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	113
Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang	117
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam penyusunan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2025 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kinerja. Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

- 1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2024 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, persiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang.
- 2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten/Kota, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.
- 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh Walikota melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Magelang memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu pada RPJMD Kota Magelang;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya ;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
- 4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2025

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2025, Inspektorat Kota Magelang mendukung sasaran daerah “Terciptanya Birokrasi yang bersih dan akuntabel”. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun lalu

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan pada tahun sebelumnya, tidak ada kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan ataupun melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, namun terdapat 1 (satu) indikator capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SAT UAN	2023			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Targe t Akhir Tahun	Realis asi Kinerj a	Persent ase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
TUJUAN: Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP	Ang ka	3,568	3,29	92,21%	1. Beberapa indikator dan target kinerja sasaran belum memenuhi kriteria SMART; 2. Masih diperlukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM terkait dengan Manajemen Risiko secara menyeluruh 3. Masih terdapat outcome pada level sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program, kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya; dan masih terdapat temuan berulang terkait asset 4. Hasil evaluasi MRI menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang belum menganggarkan kegiatan Manajemen Risiko secara eksplisit dalam DPA, baik untuk risiko tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah; keputusan manajemen yang diambil belum sepenuhnya berdasarkan risiko yang telah disusun	Mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP
	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Ang ka	8,1	15,99	197,41% NA (tidak dapat diperban dingkan)	1. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; 2. Inovasi Smart Magelang yang belum menyeluruh	1. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SAT UAN	2023			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Targe t Akhir Tahun	Realis asi Kinerj a	Persent ase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyempurnakan dokumen perencanaan PD dengan menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan agar dapat tercermin kinerja yang diharapkan dari PD; 3. Segera menyelesaikan perbaikan formulasi pada IKU agar dapat selaras dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar acuan mengukur kinerja yang diharapkan; 4. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik; 6. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja PD, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi di tahun selanjutnya; 7. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik

RENCANA KERJA 2025

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SAT UAN	2023			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Targe t Akhir Tahun	Realis asi Kinerj a	Persent ase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>nilainya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan target kinerja ke depan yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;</p> <p>8. Segera menetapkan pedoman internal yang sudah disusun agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan evaluasi internal di Pemerintah Kota Magelang;</p> <p>9. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagiandari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga PD dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi AKIP.</p>
SASARAN: Meningkatka n Lingkup Pengendalia n dan Kegiatan Pengendalia n	Nilai SAKIP Inspektorat	Ang ka	80,01	86,2	107,74% dibulatkan 100%	<p>1. Target Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada indikator kinerja tujuan belum menyesuaikan target sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena belum adanya perubahan RPJMD dan hasil Evaluasi dari Kemenpan dan RB belum terbit;</p> <p>2. Seluruh pegawai belum memahami dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja;</p> <p>3. Penggunaan SMART Magelang sebagai alat pengukuran capaian kinerja belum optimal;</p> <p>4. Belum optimalnya laporan reuiv hasil internal OPD untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.</p>	<p>1. Menginfokan perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Laporan Kinerja;</p> <p>2. Menginfokan perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun - tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja; (n-1 dan n-2).</p>
	Kapabilitas APIP	Ang ka	3,16	3	94,94%	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah	1. menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SAT UAN	2023			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Targe t Akhir Tahun	Realis asi Kinerj a	Persentase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
							mutasi pegawai
SASARAN: Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Per sen	89	97,00	108,99 % dibulatkan 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan APIP selama ini terdapat beberapa kegiatan/tugas mandatory yang belum seluruhnya dilaksanakan, hambatan utama karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor, sehingga harus memilah kegiatan yang menjadi prioritas khusus. 2. Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut. Disamping itu penyelesaian temuan terkait dengan asset membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. 3. Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen fraud khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi. 4. Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan SDM dan anggaran. 2. Upaya dalam Pemantauan Tindak Lanjut <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. b. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai. c. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindaklanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati d. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. e. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang. f. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertical dan pemberi rekomendasi. 3. Upaya Penanganan Pengaduan Masyarakat Sarana penunjang dan sumber daya untuk menyelesaikan penanganan pengaduan harus disediakan, baik

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SAT UAN	2023			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			Targe t Akhir Tahun	Realis asi Kinerj a	Persent ase Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
							melalui peningkatan kapabilitas APIP melalui transformasi pengetahuan maupun sarana lainnya seperti media penanganan pengaduan agar semua aduan masyarakat dapat terinformasi dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, telah dirumuskan tujuh (3) program dengan indikator keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil evaluasi rencana aksi program sebagai berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Persentase pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	%	100	100
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Angka	89	97,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Kapabilitas APIP	Angka	3,3	3,06
		Nilai SAKIP Inspektorat	Persen	80,01	86,2

1. Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian dengan indikator pencapaian sasaran Persentase pemenuhan Penunjang Kinerja OPD sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 9 dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 dokumen.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 30 orang/bulan.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sejumlah 12 dokumen.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 2 dokumen.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 10 paket.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 12 paket.
 - 4) Penyediaan Bahan/Material dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 12 paket.
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator pencapaian sasaran adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 7 unit.
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan

- indikator pencapaian sasaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 15 unit.
- 3) Pemeliharaan Mebel dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Mebel yang Dipelihara sebanyak 3 unit.
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 32 unit.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit.
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Pengadaan Mebel dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Paket Mebel yang disediakan sebanyak 7 unit.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 2 unit.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat "Sangat Baik", sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

2. Sasaran Program Penyelenggaraan pengawasan adalah Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran Persentase Tindak Lanjut Temuan sebesar 97,00%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 55 laporan.
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 7 laporan.
 - 3) Reviu Laporan Kinerja dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja sebanyak 30 obrik.
 - 4) Reviu Laporan Keuangan dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan sebanyak 49 obrik.
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator

pencapaian sasaran Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebanyak 12 laporan.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan sejumlah 26 laporan.

Program Penyelenggaraan pengawasan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 140,77 % dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

3. Sasaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian dengan indikator pencapaian sasaran Kapabilitas APIP dan Nilai SAKIP Inspektorat. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun sejumlah 2 rekomendasi.

- b. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 16 perangkat daerah.
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sejumlah 30 perangkat daerah.
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sejumlah 30 laporan.
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan indikator pencapaian sasaran Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sejumlah 30 perangkat daerah.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat

“Sangat Baik”, sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan.
2. Adanya koordinasi sistem informasi dan system pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang.
3. Komitmen dari pimpinan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat dengan diklat, bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2021, 2022 & 2023

RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	2022			2023		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif											
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,08	3,391	3,08	94,04%	3,568	3,29	92,21%
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	6,9	7,5	6,9	NA (tidak bisa diperbandingkan)	8,1	15,99	197,41% (Tidak bisa diperbandingkan)
	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian		Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	74,7	75,75	74,7	105,02%	80,01	86,2	107,74% dibulatkan 100%
			Kapabilitas APIP	Angka	3	3,16	3	94,94%	3,3	3,06	92,73%
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah		Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	87	88	97,01	110,24 %	89	97,00	108,99% dibulatkan 100%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah hanya dapat disajikan pada tahun n-3, dikarenakan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nama program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 berbeda dengan Tahun Anggaran 2021. Adanya perbedaan Nomenklatur sehingga Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renstra tidak bisa dihitung Capaian Kinerja n-4 dengan perbandingan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Adapun akhir periode kinerja berakhir di Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Renstra 2021-2026, maka analisis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang

Nama OPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9 dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	30 org/bln	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	32 unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	94,5 persen	130,92 persen	100%	100%	100%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	96 persen	97 persen	100%	100%	100%
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 laporan	55 laporan	100%	100%	100%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 laporan	7 laporan	100%	100%	100%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 laporan	30 laporan	100%	100%	100%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	29 laporan	49 laporan	100%	100%	100%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	12 dokumen	100%	100%	100%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan penyelenggaraan PDDT yang tepat waktu	95 persen	100 persen	100%	100%	100%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 laporan	26 laporan	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	60 persen	60 persen	100%	100%	100%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu	100 persen	100 persen	100%	100%	100%
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%	100%	100%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase jumlah PD yang nilai SAKIPnya meningkat; Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev	16,67 persen; 25 persen	96 persen; 29 persen	100%	100%	100%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 perangkat daerah	16 perangkat daerah	100%	100%	100%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	100%	100%	100%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	26 laporan	30 laporan	100%	100%	100%
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	100%	100%	100%

Tabel 2.5
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
 Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang disusun							
	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	5	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan OPD	12	Laporan	12	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan PAK	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		prasarana kantor.							
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	7	Unit	7	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	15	Unit	15	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	6	Unit	6	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	34	Unit	34	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	1	Unit	100%	100%	100%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan	2	Laporan	2	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	2	Laporan	2	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	3	Laporan	3	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan Monev Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Laporan	4	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dan tepat waktu	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dihasilkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnyameningkat	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi	3	Laporan	3	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Laporan	5	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut

Tabel 2.6
Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2023				
					Target	Realisasi	Sumber Data	Capaian	Kategori
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,568	3,29	BPKP	92,21%	Sangat Baik
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	8,1	15,99	Kemampuan RB	197,41% (Tidak bisa diperbandingkan)	NA
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	80,01	86,2	Inspektorat	107,74% dibulatkan 100%	Sangat Baik
			Kapabilitas APIP	Angka	3,3	3,06	BPKP	92,73%	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	89	97,00	Inspektorat	108,99% dibulatkan 100%	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN								118,11% dibulatkan 100%	Sangat Baik

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator kinerja untuk tahun 2023, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Hasil capaian rata-rata pengukuran indikator kinerja utama tahun 2023 adalah sebesar 100% atau “Sangat Baik”.

Untuk Indikator Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal, pada hasil evaluasi tahun 2023, “tidak dapat diperbandingkan” dengan hasil evaluasi

tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level penda maupun level organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.7

Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun 2022	2023		
						Target	Realisasi	Capaian
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,189	3,568	3,29	92,21%
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	15,30	8,1	15,99	197,41% (Tidak bisa diperbandingkan)
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	79,55	80,01	86,2	107,74% dibulatkan 100%
			Kapabilitas APIP	Angka	3	3,3	3,06	92,73%
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	97,01	89	97,00	108,99% dibulatkan 100%

Perbandingan capaian kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang menunjukkan peningkatan dari tahun 2023.

Tabel 2.8

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	2023		
					Target Akhir Tahun	Realisasi Kinerja	Tingkat Kemajuan
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,568	3,29	92,21%
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	8,1	15,99	197,41% (Tidak bisa diperbandingkan)
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	80,01	86,2	107,74%
			Kapabilitas APIP	Angka	3,3	3,06	92,73%
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	89	97,00	108,99%

Tabel 2.9
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional
Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6/7*100
1	Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel		Maturitas SPIP	Angka	3,29	3,00	100%
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	15,99	-	-
		Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	86,2	-	-
			Kapabilitas APIP	Angka	3,06	3	100%
		Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	97,00	100%	97,00%

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas, Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi pemerintah. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

- 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 2.10
Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas, Evaluasi implementasi SAKIP

Komponen	Bobot	Sub Komponen
Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%). b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5 %) c. Implementasi pengukuran (7,5 %)
Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3 %) b. Kualitas pelaporan (7,5 %) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5 %)
Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2 %) b. Kualitas Evaluasi (5 %) c. Pemanfaatan hasil Evaluasi (3 %)
Capaian Kinerja	20%	Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5 %) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Adapun pada Tahun 2022 dan 2023, pedoman evaluasi

menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perbedaan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainnya yaitu:

Tabel 2.11

Komponen Penilaian berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Komponen yang dinilai	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
	Nilai Hasil Evaluasi	100

Salah satu target indikator kinerja bidang aparatur negara adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 (pada tahun 2019). Pengukuran tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapain target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun pada tahun 2022 penilaian Maturitas SPIP diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat unsur-unsur SPIP, MRI, IEPK dan Kapabilitas APIP.

Untuk indikator Level Kapabilitas APIP, Peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN 2014-2019, dimana APIP harus telah mencapai Level 3 dari 5 Level IACM.

Pencapaian indikator tujuan tahun 2023 dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tujuan :

“Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel “

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja Maturitas SPIP sebesar 92,21% dengan predikat *“sangat baik”* dan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal tidak bisa diukur karena perubahan peraturan.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

a. Maturitas SPIP

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.12
Capaian Tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Maturitas SPIP	angka	3,568	3,29	92,21%

Terbitnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat unsur-unsur SPIP, MRI, IEPK dan Kapabilitas APIP.

Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP Terintegrasi) Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Magelang atas hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan DIY, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Magelang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,290 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi).
- b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,083 atau memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 2 (Berkembang).
- c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,940.

Perubahan nilai sesuai dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.13

Hasil Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP Terintegrasi) Tahun 2023

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	4,364	3,290	-1,074
2	MRI	4,067	3,083	-0,984
3	IEPK	4,140	2,940	-1,200

Kesimpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Magelang adalah Level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,290.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan peningkatan pemahaman personil dalam menyusun indikator dan target dalam dokumen perencanaan sehingga mencukupi dan memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achieveable, relevant, time bond*) untuk mengukur sasaran;
- 2) Melaksanakan peningkatan Komponen Struktur dan Proses atas SPIP, MRI dan IEPK sebagai berikut:
 - a. Memberikan pemahaman kepada penanggung jawab progam/kegiatan agar melaksanakan evaluasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dapat menangani residual risk, untuk dapat menghasilkan tindak lanjut hasil evaluasi dan kinerja yang lebih baik;
 - b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan manajemen Risiko secara eksplisit dalam DPA, baik untuk risiko tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah.
 - c. Meningkatkan kompetensi manajemen risiko kepada seluruh pegawai terutama bagi anggota Unit Pengelola Risiko (UPR) dan melaksanakan internalisasi manajemen risiko sehingga keputusan manajemen mempertimbangkan risiko yang telah disusun;
 - d. Menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk melakukan penilaian risiko kecurangan yang dimulai dari identifikasi, analisis, penyusunan rencana mitigasi dan pelaksanaan tindak lanjutnya.
 - e. Memberikan pemahaman kepada penanggung jawab progam/kegiatan terkait risiko kemitraan dan monitoring atas RTP yang telah disusun;
 - f. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi atas kegiatan pembelajaran anti kecurangan, rencana penyelesaian tindak lanjut mitigasi risiko tersebut serta pedoman evaluasi atas whistle blowing system.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan adalah;

1. Masih terdapat indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achieveable, relevant, time bond*); indikator sasaran strategis pemerintah daerah

yang tidak cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis; dan penetapan target kegiatan yang kurang realistis karena ditetapkan di bawah capaian tahun 2022.

2. Masih diperlukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM terkait dengan Manajemen Risiko secara menyeluruh; perlu pembangunan budaya risiko secara masif agar seluruh tingkatan pegawai memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan Manajemen Risiko secara efektif; belum ada laporan tertulis kepada atasan selaku pemberi delegasi wewenang; belum terdapat evaluasi atas kebijakan pengelolaan SDM secara berkala. Kegiatan Manajemen Risiko di masing-masing Perangkat Daerah belum secara eksplisit tertuang dalam Penganggaran DPA masing-masing Perangkat Daerah; 1) belum seluruh OPD menyusun register risiko strategis OPD dan belum melakukan penilaian risiko kecurangan yang dimulai dari identifikasi, analisis, penyusunan rencana mitigasi dan pelaksanaan tindak lanjutnya; belum semua OPD yang bermitra menyusun risiko kemitraan; keputusan manajemen yang diambil belum sepenuhnya berdasarkan risiko yang telah disusun, baik risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis perangkat daerah, maupun risiko operasional; dan RTP belum dilakukan pemantauannya secara memadai. 2) Komunikasi yang efektif telah dilakukan baik internal maupun eksternal secara terstruktur dan berkala, misalnya pada acara NgopiBareng Pak Walikota yang menjadi forum komunikasi berkala dari Pemerintah kepada Masyarakat. 3) Evaluasi terpisah telah dilaksanakan pada program dan kegiatan untuk menilai keselarasan antara program dan sasaran dalam bentuk evaluasi SAKIP oleh APIP. Pada parameter MRI, telah dilaksanakan reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk tingkat operasional unit kerja berupa Evaluasi PPBR pada beberapa OPD. Namun demikian, reviu belum dilaksanakan pada tingkat strategis unit kerja
3. Masih terdapat outcome pada level sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program, kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya; dan masih terdapat temuan berulang terkait aset pada Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 karena penatausahaan aset masih belum tertib dan belum sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Hasil evaluasi MRI menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang belum menganggarkan kegiatan Manajemen Risiko secara eksplisit dalam DPA, baik untuk risiko tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah; keputusan manajemen yang diambil belum

sepenuhnya berdasarkan risiko yang telah disusun. Kemudian, belum ada identifikasi Risiko Kemitraan, belum seluruh OPD menyusun register risiko strategis OPD dan belum melakukan penilaian risiko kecurangan yang dimulai dari identifikasi, analisis, penyusunan rencana mitigasi dan pelaksanaan tindak lanjutnya; belum semua OPD yang bermitra menyusun risiko kemitraan; serta pemantauan terhadap manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Pemantauan belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebijakan; belum sepenuhnya mendokumentasikan proses dan hasil pemantauan; pemantauan belum sepenuhnya dilakukan terhadap implementasi pengendalian; keterjadian risiko; pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko; pemantauan belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

5. Hasil Penilaian Mandiri atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Magelang belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP mencakup cegah, deteksi, dan respon; SOP seperangkat sistem antikorupsi belum direviu dan dievaluasi secara berkala; eksistensi dan efektivitas implementasi kebijakan antikorupsi belum dilakukan reviu dan evaluasi secara formal dan terjadwal; serta baru sebagian OPD yang melakukan penilaian risiko kecurangan yang dimulai dari identifikasi, analisis, penyusunan rencana mitigasi dan pelaksanaan tindak lanjutnya.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

b. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.14
Capaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	8,1	15,99	197,41% NA (tidak dapat diperbandingkan)

Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun untuk Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hasil dari penilaian tahun 2022 dan 2023 “tidak dapat diperbandingkan” dengan target dari yang sudah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 karena perbedaan aturan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan predikat BB (sangat baik) pada tahun 2023. Sebelumnya SAKIP Pemkot Magelang berpredikat B pada tahun 2021 dan BB pada tahun 2022. Pemerintah Kota Magelang mendapatkan penghargaan BB setelah memenuhi serangkaian evaluasi sesuai dengan Permen PAN & RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, bahwa evaluasi dilakukan terhadap keberadaan, pemanfaatan, dan kualitas setiap komponen, sub komponen, dan kriteria evaluasi.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang akan

- a. Membuat pedoman evaluasi internal (Pedoman evaluasi internal yang dimiliki Pemerintah Kota Magelang masih dalam proses penetapan);
- b. Melakukan perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan karena Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan evaluasi internal implementasi AKIP pada seluruh PD melalui aplikasi

smart.magelangkota.go.id, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan adalah;

- a. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
- b. Inovasi Smart Magelang yang belum menyeluruh.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan;

- a. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
- b. Menyempurnakan dokumen perencanaan PD dengan menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan agar dapat tercermin kinerja yang diharapkan dari PD;
- c. Segera menyelesaikan perbaikan formulasi pada IKU agar dapat selaras dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar acuan mengukur kinerja yang diharapkan;
- d. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
- f. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja PD, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi di tahun selanjutnya;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan target kinerja ke depan yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
- h. Segera menetapkan pedoman internal yang sudah disusun agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan evaluasi internal di

Pemerintah Kota Magelang;

- i. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga PD dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi AKIP.

Capaian kinerja Tujuan, didukung oleh pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 90,36% dari total pagu.

Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja untuk tahun 2023, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :

“Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian“

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatkan lingkup pengendalian dan kegiatan pengendalian dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Inspektorat sebesar 107,74% dibulatkan menjadi 100% dengan predikat *sangat baik* dan indikator Kapabilitas APIP sebesar 92,73% dengan predikat *sangat baik*.

a. Nilai SAKIP Inspektorat

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.15

Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	80,01	86,2	107,74% dibulatkan 100%

Berdasarkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kota Magelang memperoleh nilai sebesar 86,22 (BB) Sangat Baik, yang artinya terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu kerja utama maupun unit kerja Pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki siste manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon ¾. Berikut

uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

No	Komponen	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja (30%)	24,60	26,40
2	Pengukuran Kinerja (30%)	23,40	25,50
3	Pelaporan Kinerja (15%)	12,30	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	19,25	22,00
JUMLAH TOTAL		79,55	86,20

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1 adalah;

1. Target Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada indikator kinerja tujuan belum menyesuaikan target sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena belum adanya perubahan RPJMD dan hasil Evaluasi dari Kemenpan dan RB belum terbit;
2. Seluruh pegawai belum memahami dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja;
3. Penggunaan SMART Magelang sebagai alat pengukuran capaian kinerja belum optimal;
4. Belum optimalnya laporan reuiu hasil internal OPD untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan menindaklanjuti saran atas hasil evaluasi yaitu:

1. Menginfokan perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Laporan Kinerja;
2. Menginfokan perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun -tahun sebelumnya pada Laporan Kinerja; (n-1 dan n-2).

b. Kapabilitas APIP

Tabel 2.17
Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Kapabilitas APIP	Angka	3,3	3,06	92,73%

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2023 berada pada Level 3 (Delivered) dengan Skor 3,00, dengan simpulan per elemen sebagai berikut:

Tabel 2.18
Hasil QA Kapabilitas APIP Tahun 2023

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi Tahun 2023		Hasil Evaluasi Tahun 2022	
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)							
1	Pengelolaan sumber daya manusia	0,72	4	0,54	3	0,54	3
2	Praktik professional	0,63	3	0,54	3	0,54	3
3	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	0,24	4	0,24	4	0,18	3
4	Budaya dan hubungan organisasi	0,24	4	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3	0,36	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)							
6	Peran dan Layanan	1,40	3	1,20	3	1,20	3
		3,59	3	3,06	3	3,00	3

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang akan melakukan langkah-langkah Area of Improvement (AoI) Kapabilitas APIP sebagai berikut:

1. Elemen Pengelolaan SDM

Topik Perencanaan SDM APIP belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM belum dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan dan hasilnya yang menunjukkan sejauh mana efektifitas pemenuhan kebutuhan dan penempatan SDM APIP.

- ✓ Evaluasi pengembangan kompetensi telah dilakukan secara berkelanjutan namun evaluasi tersebut belum dilakukan terhadap pengembangan profesi, pemberian penghargaan dan partisipasi aktif atas SDM/APIP pada organisasi profesi/asosiasi.
- ✓ Proyeksi kebutuhan kompetensi yang telah disusun hanya memuat rencana diklat dan belum dituangkan dalam suatu rencana program pengembangan SDM yang antara lain memuat pemetaan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis dan tujuan organisasi.
- ✓ Inspektorat Daerah Kota Magelang telah memiliki kebijakan pejabat/pimpinan sebagai role model atas pengembangan SDM

sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 069/57/112 Tahun 2017 tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang, namun belum menyusun laporan berkala monitoring/evaluasi atas pelaksanaan program role model dan melaksanakan survei/observasi terkait proses pengaplikasian role model APIP di unit kerja APIP dan Pemerintah Daerah.

2. Elemen Praktik Profesional

Topik perencanaan pengawasan telah berada pada level 3 namun masih terdapat area of improvement yaitu penyusunan PKPT belum sepenuhnya berbasis risiko. Evaluasi RR dan RTP tingkat OPD belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar penyusunan PKPT Tahun 2023.

- ✓ Perencanaan pengawasan belum dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan adanya penugasan tambahan akibat dari perubahan lingkungan strategis maupun risiko yang baru teridentifikasi.
- ✓ Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum diintegrasikan dengan profil risiko Pemerintah Kota Magelang secara keseluruhan (Enterprise Risk Management/ERM). Saat ini penyusunan PPBR masih pada area pengawasan perangkat daerah.

Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas telah berada pada level 3 namun masih terdapat area of improvement yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang belum melakukan telaah sejawat intern antar Irban untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Telaah sejawat antar irban terakhir dilakukan pada tahun 2019. Untuk dapat meningkatkan topik program penjaminan dan peningkatan kualitas ke level 4, terdapat area of improvement yaitu Pada tahun 2023 telah dilakukan evaluasi atas Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas namun sebatas kebijakan kendali mutu dan belum dilakukan secara berkelanjutan.

3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Telah berada pada level 4, peningkatan SAKIP mempengaruhi peningkatan akuntabilitas dan kinerja

4. Budaya dan Hubungan Organisasi

Topik Pengelolaan Komunikasi Internal

Topik pengelolaan komunikasi internal belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu evaluasi belum dilakukan terhadap seluruh pola koordinasi yang ada apakah sudah dapat menciptakan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP untuk peningkatan perbaikan aktivitas pengawasan. Evaluasi yang telah

dilakukan pada tahun 2023 atas pengelolaan komunikasi intern hanya sebatas kebijakan komunikasi internal.

Topik Hubungan APIP dan Manajemen

Topik hubungan APIP dan manajemen belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pola hubungan dengan manajemen untuk memastikan bahwa partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen dapat memberikannilai tambah bagi perbaikan tata Kelola pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kota Magelang telah berpartisipasi aktif dalam forum tingkat daerah seperti forum TPTGR, Satgas Saber Pungli, Satgas Covid.

Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Topik koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu APIP belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas identifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan secara berkelanjutan yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil. Tujuannya untuk memastikan cakupan pengawasan yang dilakukan telah memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan

5. Struktur Tata Kelola

Topik mekanisme pendanaan

Topik mekanisme pendanaan telah berada pada level 3, namun masih terdapat area of improvement yaitu total anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Magelang belum mendapatkan jaminan pendanaan yang cukup sesuai Permendagri Nomor 84 tahun 2022 yaitu paling sedikit sebesar 0,75% dari total APBD. Untuk dapat meningkatkan topik mekanisme pendanaan ke level 4 terdapat area of improvement yaitu belum dilakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan, implementasi dan hasil atas mekanisme pendanaan di Inspektorat Daerah Kota Magelang.

Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

Topik akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melaksanakan evaluasi terhadap SK Inspektur Kota Magelang Nomor 700/006/600 Tahun 2018 dan telah terbit kebijakan terbaru yaitu SK Inspektur Kota Magelang Nomor 700/026/600 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kota Magelang Nomor 700/006/600 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pembatasan Akses oleh Obyek Pemeriksaan namun belum mencakup implementasi dan hasil serta tindak lanjut terhadap aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses atau intervensi di Inspektorat Daerah Kota Magelang secara berkelanjutan sebagai bahan peningkatan kualitas pengawasan intern.

Topik Hubungan Pelaporan

Topik hubungan pelaporan belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang belum melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan dan pelaksanaan pelaporan antara APIP dan Wali Kota yang sudah berjalan untuk memastikan standar informasi-informasi yang dilaporkan masih relevan dan bermanfaat untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh Wali Kota dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Magelang. Inspektorat Daerah Kota Magelang telah secara rutin menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (ILHPS) APIP dan menyampaikannya kepada Wali Kota dan telah memiliki SOP Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

6. Peran dan Layanan

Topik Audit Ketaatan

Topik Audit Ketaatan belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan belum dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis. Topik Audit Kinerja Topik Audit Kinerja telah berada pada level 3 yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melaksanakan Audit Kinerja, namun masih dalam tahap pendahuluan yaitu tahap penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran audit kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Sehingga masih terdapat area of improvement sebagai berikut:

- ✓ Audit Kinerja yang dilakukan masih belum menyentuh pada level sasaran dan program strategis pemerintah daerah.
- ✓ Hasil penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian pada Perangkat Daerah belum dikaitkan dengan indikator parameter penilaian, temuan dan rekomendasi audit serta dimanfaatkan dalam perumusan TAO sehingga hasil pengawasan belum berkorelasi dengan efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Topik Audit Kinerja belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu Inspektorat Daerah Kota Magelang belum melakukan evaluasi berkelanjutan 29 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSR.E untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli. terhadap pedoman dan pelaksanaan audit kinerja.

Topik Assurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk and Control (GRC)

Topik Assurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi K/L/D belum memenuhi parameter kapabilitas level 4 yaitu APIP belum dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pedoman dan pelaksanaan asurans atas GRC. AOI yang timbul dipantau dan ditindaklanjuti dalam rangka institusionalisasi asurans GRC.

Topik Jasa Konsultansi

Untuk dapat meningkat ke level 4, APIP belum melakukan evaluasi terhadap pedoman dan pelaksanaan pemberian jasa konsultansi kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang secara berkelanjutan untuk perbaikan tata kelola organisasi keseluruhan. AOI yang timbul dipantau dan ditindaklanjuti dalam rangka internalisasi.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan:

1. Melakukan peningkatan atas pemenuhan parameter kapabilitas level 3, sebagai berikut:
 - ✓ Melakukan telaah sejawat antar irban secara periodik sesuai dengan kebijakan internal Inspektorat;
 - ✓ Mendampingi dan memfasilitasi penyusunan RR dan RTP atas risiko operasional OPD, risiko strategis Perangkat Daerah dan risiko strategis Pemda serta melakukan evaluasi untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan PPBR.
 - ✓ Mengusulkan anggaran pengawasan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan APBD yang berlaku;
 - ✓ Melaksanakan audit kinerja yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam tata kelola, risiko serta pengendalian organisasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan prioritas dan/atau keunggulan daerah pada tujuan atau sasaran strategis ultimate outcome pemerintah daerah

2. Melakukan perbaikan dan peningkatan atas pemenuhan parameter kapabilitas level 4, sebagai berikut:
- ✓ Setiap topik yang telah berjalan dengan baik, dievaluasi secara berkelanjutan terkait kebijakan, implementasi dan hasil, berikut bukti pelaksanaan tindaklanjutnya. Substansi evaluasi agar memperlihatkan analisis yang menunjukkan adanya perbaikan terus menerus sesuai kondisi terkini;
 - ✓ Melakukan evaluasi terhadap pengembangan profesi, pemberian penghargaan dan partisipasi aktif atas SDM APIP pada organisasi profesi/asosiasi;
 - ✓ Menyusun dokumen rencana program pengembangan SDM (Human Capital Development Program) yang memproyeksikan kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis Pemerintah Daerah termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya dan mengevaluasi secara berkelanjutan atas implementasinya;
 - ✓ Menyusun laporan berkala monitoring/evaluasi atas pelaksanaan program role model dan melaksanakan survei/observasi terkait proses pengaplikasian role model APIP di unit kerja APIP dan Pemerintah Daerah;
 - ✓ Menyusun perencanaan pengawasan yang telah diintegrasikan dengan profil risiko organisasi secara keseluruhan;
 - ✓ Melaksanakan evaluasi atas topik pengelolaan komunikasi intern APIP, hubungan APIP dan manajemen serta koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan mencakup evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil;
 - ✓ Melaksanakan evaluasi berkelanjutan terhadap pedoman dan pelaksanaan audit kinerja;
 - ✓ Melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pedoman dan pelaksanaan asurans atas GRC. AoI yang timbul dipantau dan ditindaklanjuti dalam rangka institusionalisasi asurans GRC.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3 adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun mutasi pegawai.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 90,36% dari total pagu.

Sasaran 2 :

“Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah“

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran persentase tindak lanjut temuan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 108,99% dibulatkan 100% dengan predikat “*sangat tinggi*”. Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.19

Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	89	97,00	108,99 % dibulatkan 100%

Pada periode Tahun 2023 ini Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melakukan upaya-upaya penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan hasil 94,29% atau 875 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 928 rekomendasi, serta Tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan internal APIP dengan hasil 99,71% atau 348 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari 349 rekomendasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan APIP selama ini terdapat beberapa kegiatan/tugas mandatory yang belum seluruhnya dilaksanakan, hambatan utama karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor, sehingga harus memilah kegiatan yang menjadi prioritas khusus.
2. Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut. Disamping itu penyelesaian temuan terkait dengan asset membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.
3. Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan

pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen *fraud* khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi.

4. Adanya pihak ketiga / instansi vertikal dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan:

1. Dalam rangka memenuhi seluruh kegiatan pengawasan yaitu audit, reviu, evaluasi maupun pengawasan lainnya, dibutuhkan dukungan atau ketersediaan anggaran yang berkelanjutan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, dimana Pemerintah Daerah agar mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk alokasi anggaran kepada Inspektorat/APIP, jika tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri tersebut maka menyertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pimpinan terkait alokasi anggaran pengawasan secara obyektif. Selain itu yang penting untuk segera dilakukan adalah memenuhi ketersediaan Sumber Daya Aparatur Fungsional Auditor dan PPUPD yang mencukupi sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Nomor B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah. Adapun peran APIP adalah, menentukan apakah Sistem Pengendalian Intern dalam organisasi berjalan dengan baik atau tidak; menjalankan fungsi *assurance* apakah tujuan Sistem Pengendalian Intern dapat tercapai; serta menjalankan fungsi *consulting* kepada manajemen terkait *effectiveness of risk management, control* dan *governance processes* sesuatu yang sangat penting. Dan hal itu bisa terlaksana dengan baik apabila anggaran pengawasan dan jumlah SDM terpenuhi.
2. Upaya dalam Pemantauan Tindak Lanjut
 - a. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai.

- c. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindak lanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati
 - d. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - e. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang.
 - f. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi.
3. Upaya Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Sarana penunjang dan sumber daya untuk menyelesaikan penanganan pengaduan harus disediakan, baik melalui peningkatan kapabilitas APIP melalui transformasi pengetahuan maupun sarana lainnya seperti media penanganan pengaduan agar semua aduan masyarakat dapat terinformasi dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2, didukung oleh pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 89,75% dari total pagu.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Inspektorat Daerah. Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dari program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20
Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				Maturitas SPIP	angka	4	Rp244.000.000	3,189	Rp156.751,156	3,568	Rp215.896.200	3,189	Rp26.924,650	3,189	Rp70.872.600	3,189	Rp107.732.650	3,29	Rp193.761,714	3,29	Rp193.761,714	3,29	Rp350,512,870	82%	144%	Inspektorat Daerah
				Nilai SAKIP komponen Evaluasi Internal	angka	8,4	Rp7.864,670.000	15,3	Rp6.542,534,512	8,1	Rp7.199,686,678	15,3	Rp11.864,627	15,3	Rp3.386,636,709	15,3	Rp4.705,928,741	15,3	Rp6.764,959,754	15,3	Rp6.764,959,754	15,3	Rp13,291,470,080	182%	169%	Inspektorat Daerah
Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian				Nilai SAKIP Inspektorat	angka	8,4	Rp7.864,670.000	79,55	Rp6.542,534,512	80,01	Rp7.199,686,678	79,55	Rp11.864,627	79,55	Rp3.386,636,709	86,2	Rp4.705,928,741	86,2	Rp6.764,959,754	86,2	Rp6.764,959,754	86,2	Rp13,291,470,080	103%	169%	Inspektorat Daerah
				Kapabilitas APIP	angka	3,3	Rp7.864,670.000	3	Rp6.542,534,512	3,3	Rp7.199,686,678	3	Rp11.864,627	3	Rp3.386,636,709	3	Rp4.705,928,741	3,06	Rp6.764,959,754	3,3	Rp6.764,959,754	3,3	Rp13,291,470,080	100%	169%	Inspektorat Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah			Persentase Tindak Lanjut Temuan	persen	95	Rp244.000.000	97,01	Rp156.751.156	89	Rp215.896.200	97,14	Rp26.924.650	96,88	Rp70.872.600	96,88	Rp107.732.650	97	Rp193.761.714	97	Rp193.761.714	97	Rp350.512.870	102%	144%	Inspektoraat Daerah
		6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	persen	100	Rp7.285.920.000	100	Rp6.163.813.118	100	Rp6.477.480.178	25	Rp1.044.859.677	50	Rp3.114.485.956	75	Rp4.269.599.538	100	Rp6.112.358.901	100	Rp6.112.358.901	100	Rp12.260.147.833	100%	168%	Inspektoraat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	persen	100	Rp14.000.000	100	Rp65.538.686	100	Rp18.789.300	25	Rp787.000	50	Rp4.822.650	75	Rp12.011.850	100	Rp18.655.000	100	Rp18.655.000	100	Rp84.193.886	100%	60%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	Rp4.000.000	2	Rp57.876.236	2	Rp4.239.400	2	Rp0	2	Rp507.200	2	Rp1.616.700	9	Rp4.156.850	9	Rp4.156.850	9	Rp62.033.086	450%	1551%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	Rp2.000.000	1	Rp1.497.950	1	Rp2.760.000	0	Rp0	1	Rp1.230.400	1	Rp2.446.400	1	Rp2.750.400	1	Rp2.750.400	1	Rp4.248.350	100%	212%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	Rp2.000.000	1	Rp1.500.750	1	Rp2.760.000	0	Rp0	1	Rp685.900	1	Rp2.750.950	1	Rp2.750.950	1	Rp2.750.950	1	Rp4.251.700	100%	213%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	Rp2.000.000	1	Rp1.564.000	1	Rp1.240.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp1.234.600	1	Rp1.234.600	1	Rp2.798.600	100%	140%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	Rp2.000.000	1	Rp1.483.000	1	Rp1.240.000	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp1.234.600	1	Rp1.234.600	1	Rp2.717.600	100%	136%	Inspektoral Daerah		

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	Rp2.000.000	2	Rp1.616.750	2	Rp6.549.900	1	Rp787.000	1	Rp2.399.150	1	Rp5.197.600	2	Rp6.527.600	2	Rp6.527.600	2	Rp8.144.350	100%	407%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	persen	100	Rp8.009.700.000	100	Rp5.565.052.836	100	Rp5.662.391.858	25	Rp963.321.776	50	Rp2.881.698.908	75	Rp3.900.618.855	100	Rp5.376.009.509	100	Rp5.376.009.509	100	Rp10.941.062.345	100%	182%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.01.2.02.01 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	Rp6.000.000.000	30	Rp5.557.994.136	30	Rp5.653.071.858	30	Rp961.558.876	30	Rp2.878.002.308	30	Rp3.893.162.655	30	Rp5.366.795.309	30	Rp5.366.795.309	30	Rp10.924.789.445	94%	182%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	Rp5.700.000	12	Rp3.809.000	12	Rp5.700.000	12	Rp153.000	12	Rp2.086.700	12	Rp3.854.000	12	Rp5.612.000	12	Rp5.612.000	12	Rp9.421.000	100%	165%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp2.000.000	1	Rp1.633.700	1	Rp1.620.000	3	Rp1.609.900	6	Rp1.609.900	9	Rp1.609.900	12	Rp1.609.900	12	Rp1.609.900	12	Rp3.243.600	1200%	162%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	Rp2.000.000	1	Rp1.616.000	1	Rp2.000.000	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp1.992.300	1	Rp1.992.300	1	Rp1.992.300	1	Rp3.608.300	100%	180%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		asi Anggaran																								
		6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	Rp4.602.000	100	Rp3.866.700	100	Rp4.601.800	25	Rp12.200	50	Rp984.000	75	Rp3.679.000	100	Rp4.559.950	100	Rp4.559.950	100	Rp8.426.650	100%	183%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	Rp4.602.000	2	Rp3.866.700	2	Rp4.601.800	2	Rp12.000	2	Rp984.000	4	Rp3.679.000	4	Rp4.559.950	4	Rp4.559.950	4	Rp8.426.650	200%	183%	Inspektoral Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	persen	100	Rp272.203.000	100	Rp174.653.759	100	Rp212.870.300	25	Rp18.159.091	50	Rp79.447.960	75	Rp108.911.490	100	Rp209.651.900	100	Rp209.651.900	100	Rp369.012.473	100%	136%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	Rp9.747.000	10	Rp9.743.500	10	Rp8.665.800	3	Rp9.744.700	6	Rp1.555.000	9	Rp2.741.000	10	Rp8.657.220	10	Rp8.657.220	10	Rp18.400.720	100%	189%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	Rp15.680.000	12	Rp15.379.600	12	Rp15.679.300	3	Rp0	6	Rp3.594.686	9	Rp7.617.786	12	Rp15.593.586	12	Rp15.593.586	12	Rp15.680.000	100%	100%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	Rp17.724.000	12	Rp13.628.450	12	Rp17.723.800	3	Rp2.055.336	6	Rp8.088.750	9	Rp11.777.800	12	Rp17.702.300	12	Rp17.702.300	12	Rp31.330.750	100%	177%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	Rp9.052.000	12	Rp9.046.100	12	Rp13.927.400	3	Rp963.100	6	Rp4.146.490	9	Rp7.501.620	12	Rp13.916.330	12	Rp13.916.330	12	Rp22.962.430	100%	254%	

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		Bahan / Material																								
		6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Rp20.000.000	12	Rp13.679.510	12	Rp13.680.000	3	Rp2.681.780	6	Rp3.022.675	9	Rp5.739.675	12	Rp13.679.275	12	Rp13.679.275	12	Rp27.358.785	100%	137%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp200.000.000	12	Rp13.176.599	12	Rp143.194.000	3	Rp2.714.175	6	Rp59.040.359	9	Rp73.533.609	12	Rp140.103.189	12	Rp140.103.189	12	Rp253.279.788	100%	127%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan pengadaan BMD perangkat daerah	per sen	100	Rp580.000.000	100	Rp0	100	Rp99.454.250	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	100	Rp99.454.250	100	Rp99.454.250	100	Rp99.454.250	#VALUE!	17%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	Rp500.000.000	0	Rp0	0	Rp-	0	0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	0	0	Rp0	33	Rp38.185.700	0	Rp0	0	0	0	0	7	Rp38.185.700	7	Rp38.185.700	7	Rp38.185.700			Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		Mebel																								
		6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia nya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	Rp80.000.000	0	Rp0	4	Rp61.268.550	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	2	Rp61.268.550	2	Rp61.268.550	2	Rp61.268.550	20%	77%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	Rp202.415.000	100	Rp175.483.892	100	Rp224.689.670	25	Rp38.073.258	50	Rp80.943.705	75	Rp126.053.806	100	Rp183.653.999	100	Rp183.653.999	100	Rp359.137.891	100%	177%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	laporan	12	Rp12.467.000	12	Rp11.532.700	12	Rp11.581.900	3	Rp1.270.500	6	Rp4.202.150	9	Rp6.313.150	12	Rp11.560.300	12	Rp11.560.300	12	Rp23.093.000	100%	185%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		Jasa Surat Menyurat	Menyurat	Menyurat																						
		6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	Rp120.000.000	12	Rp91.949.245	12	Rp140.997.120	3	Rp24.617.030	6	Rp50.865.393	9	Rp75.849.051	12	Rp104.451.693	12	Rp104.451.693	12	Rp198.400.938	100%	164%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	Rp69.948.000	12	Rp72.001.947	12	Rp72.110.650	3	Rp12.185.728	6	Rp25.876.162	9	Rp43.891.605	12	Rp67.642.006	12	Rp67.642.006	12	Rp139.643.953	100%	200%	Inspektoral Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14	16 = 15/5 x 100%	17		
		Kantor																								
		6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	Rp203.000.000	100	Rp179.217.245	100	Rp254.683.000	25	Rp24.396.552	50	Rp66.588.733	75	Rp118.324.737	100	Rp220.374.293	100	Rp220.374.293	100	Rp398.860.538	100%	196%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	Rp72.000.000	7	Rp71.959.427	7	Rp93.625.000	7	Rp10.962.052	7	Rp24.269.907	7	Rp36.606.057	7	Rp71.582.942	7	Rp71.582.942	7	Rp143.542.369	100%	199%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	Rp83.000.000	15	Rp72.316.018	15	Rp123.072.000	15	Rp10.419.500	15	Rp33.772.426	15	Rp64.667.280	15	Rp111.021.101	15	Rp111.021.101	15	Rp183.337.119	100%	221%	Inspektorat Daerah
		6.01.01.2.09.05		Jumlah mebeleur yang	unit	3	Rp5.000.000	3	Rp2.806.000	3	Rp3.000.000	3	Rp0	3	Rp25.000	3	Rp25.000	3	Rp2.925.000	3	Rp2.925.000	3	Rp5.000.000	100%	100%	Inspektorat

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		Pemeliharaan Mebel		dipelihara																					Daerah	
		6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	32	Rp22.000.000	32	Rp21.990.000	32	Rp23.711.500	0	Rp3.015.000	0	Rp8.145.000	3	Rp14.815.000	3	Rp23.610.000	3	Rp23.610.000	3	Rp45.600.000	9%	207%	Inspektoral Daerah
		6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit	1	Rp21.000.000	1	Rp10.145.800	1	Rp10.999.500	0	Rp0	0	Rp376.400	1	Rp2.211.400	1	Rp10.996.600	1	Rp10.996.600	1	Rp21.142.400	100%	100%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17	
		dan Bangunan Lainnya																									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung							Rp275.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp238.650	1	Rp238.650	1	Rp238.650				Inspektoral Daerah
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	persen	97,5	Rp244.000.000	103,5	Rp156.751,156	93	Rp215.896.200	56,53	Rp26.924,650	77	Rp70.872.600	120,42	Rp107.732.650	130,92	Rp193.761,74	130,92	Rp193.761,74	130,92	Rp350.512,870	134%	144%	Inspektoral Daerah	

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	persen	100	Rp219.000.000	99,76	Rp144.219.406	94	Rp190.494.200	94,5	Rp25.138.650	96,88	Rp63.293.100	96,88	Rp97.419.150	97	Rp171.273.714	97	Rp171.273.714	97	Rp315.493.120	97%	144%	Inspektoral Daerah
		6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	34	Rp65.000.000	40	Rp44.547.250	34	Rp54.576.800	7	Rp6.435.000	9	Rp11.941.650	32	Rp28.447.450	55	Rp41.546.648	55	Rp41.546.648	55	Rp86.093.898	162%	132%	Inspektoral Daerah
		6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	Rp13.000.000	7	Rp5.363.000	7	Rp11.150.500	2	Rp0	2	Rp2.424.600	3	Rp3.168.700	7	Rp10.694.366	7	Rp10.694.366	7	Rp16.057.366	100%	124%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		h																								
		6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	25	Rp9.000.000	25	Rp4.792.750	25	Rp23.732.000	I	Rp2.145.000	I	Rp8.751.300	30	Rp12.582.500	30	Rp18.826.100	30	Rp18.826.100	30	Rp23.618.850	120%	262%	Inspektoraat Daerah
		6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	29	Rp32.000.000	38	Rp20.986.206	29	Rp20.554.000	5	Rp4.478.500	22	Rp11.235.150	34	Rp12.221.350	49	Rp20.354.100	49	Rp20.354.100	49	Rp41.340.306	169%	129%	Inspektoraat Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	12	Rp100.000.000	12	Rp68.530.200	12	Rp80.480.900	3	Rp1210.800	6	Rp28.940.400	9	Rp40.999.150	12	Rp79.852.500	12	Rp79.852.500	12	Rp148.382.700	100%	148%	Inspektoral Daerah
				Jumlah temuan BPK	temuan	6		10		10		10		10		10		10		10		10		167%		Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu	persen	95	Rp25.000.000	95	Rp12.531.750	95	Rp25.402.000	100	Rp1.786.000	100	Rp7.579.500	100	Rp10.313.500	100	Rp22.488.000	100	Rp22.488.000	100	Rp35.019.750	105%	140%	Inspektoral Daerah
		6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	0	Rp15.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Inspektoral Daerah
		6.01.02.2.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	Rp10.000.000	18	Rp12.531.750	25	Rp25.402.000	4	Rp1.786.000	11	Rp7.579.500	22	Rp10.313.500	26	Rp22.488.000	26	Rp22.488.000	26	Rp35.019.750	104%	350%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		Tujuan Tertentu																								
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	persen	100	Rp578.750.000	47,5	Rp378.721.394	60	Rp722.206.500	50,63	Rp73.780.950	53,75	Rp272.150.753	56,87	Rp436.329.203	60	Rp652.600.853	60	Rp652.600.853	60	Rp1.031.322.247	60%	178%	Inspektoral Daerah
		6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dan tepat waktu	persen	100	Rp4.000.000	100	Rp3.545.000	100	Rp4.445.800	0	Rp0	0	Rp0	100	Rp0	100	Rp4.052.500	100	Rp4.052.500	100	Rp7.597.500	100%	190%	Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	1	Rp4.000.000	1	Rp3.545.000	1	Rp4.445.800	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp0	1	Rp4.052.500	2	Rp4.052.500	2	Rp7.597.500	200%	190%	Inspektoral Daerah
		6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnyameningkat	persen	16,67	Rp574.750.000	100	Rp375.176.394	16,67	Rp717.760.700	0	Rp73.780.950	0	Rp272.150.753	96	Rp436.329.203	96	Rp648.548.353	96	Rp648.548.353	96	Rp1.023.724.747	576%	178%	Inspektoral Daerah
				Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev	persen	35		70		20		0		0		29		29		29		29		83%		Inspektoral Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		6.01.03.2.02.01 Penda mping an dan Asiste nsi Urusa n Pemer intaha n Daera h	Terlaksana nya Pendampin gan, Asistensi Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangka t daerah	11	Rp5.000.000	19	Rp2.318.800	11	Rp24.528.000	6	Rp1.582.300	6	Rp5.213.550	14	Rp10.970.800	16	Rp21.540.650	16	Rp21.540.650	16	Rp23.859.450	145%	477%	Inspektora t Daerah
		6.01.03.2.02.02 Penda mping an, Asiste nsi, Verifik asi, dan Penilai an	Terlaksana nya Pendampin gan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangka t daerah	30	Rp242.000.000	12	Rp134.900.202	25	Rp351.490.900	24	Rp65.973.650	30	Rp144.503.186	30	Rp256.875.286	30	Rp318.434.086	30	Rp318.434.086	30	Rp453.334.288	100%	187%	Inspektora t Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x 100%		17
		Reformasi Birokrasi																								
		6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	26	Rp235.000.000	3	Rp217.572.442	26	Rp284.098.000	16	Rp5.830.000	22	Rp115.934.567	30	Rp157.962.567	30	Rp264.979.767	30	Rp264.979.767	30	Rp482.552.209	115%	205%	Inspektat Daerah

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				K			Rp		K (%)	Rp (%)		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17		
		san Korupsi																										
		6.01.03.2.02.04 Penda mping an, Asiste nsi dan Verifik asi Peneg akan Integri tas	Terlaksana nya Pendampin gan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangka t daerah	30		1		30		14		30		30		30		30		30		30		30		
							Rp92.750.000		Rp20.384.950		Rp57.643.800		Rp395.000		Rp6.499.450		Rp10.520.550		Rp43.593.850		Rp43.593.850		Rp63.978.800		100%	69%	Inspekt orat Daerah	

RENCANA KERJA 2025

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = 8 + 14		16 = 15/5 x100%		17
		INSPEKTORAT				Rp8.108.670.000	Rp6.699.285.668	Rp7.415.582.878	Rp1.455.652.77	Rp3.457.509.309	Rp4.813.661.391	Rp6.958.721.468	Rp6.958.721.468	Rp13.641.982.950												

Tabel 2.21
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang

Indikator	Satuan	Realisasi		Target						Realisasi				Kinerja				Keterangan/ Pendorong/ Penghambat
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023				2023				
										TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
Urusan Pengawasan																		
Kapabilitas APIP	Angka	3,00	3,00	3,00	3,16	3,30	3,30	3,30	3,30	3,00	3,00	3,00	3,06	90,91%	90,91%	90,91%	92,73%	
MRI	Angka	2,12	2,28	2,12	2,29	2,47	2,65	2,82	3,00	2,28	2,28	2,28	3,08	92,31%	92,31%	92,31%	124,70%	
Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	6,90	6,90	6,90	7,50	8,10	8,20	8,30	8,40	15,3	15,3	15,3	15,3	188,89%	188,89%	188,89%	188,89%	
Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,38	2,94	3,38	3,40	3,40	3,42	3,43	3,45	2,94	2,94	2,94	2,94	86,47%	86,47%	86,47%	86,47%	
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	87,00	97,01	87,00	88,00	89,00	91,00	93,00	95,00	97,14%	96,88%	96,88%	97,00%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang
Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja DPD	100 persen	100 persen
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 persen	100 persen
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9 dokumen
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 dokumen
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	100 persen	100 persen
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	30 org/bln
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Pemenuhan	100 persen	100 persen

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
Daerah	laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen
6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket
6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	12 paket
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen
6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen
6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 unit
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit
6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	3 unit
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	32 unit

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	94,5 persen	130,92 persen
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	96 persen	97 persen
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 laporan	55 laporan
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 laporan	7 laporan
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 laporan	30 laporan
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	29 laporan	49 laporan
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	12 dokumen
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan penyelenggaraan PDDT yang tepat waktu	95 persen	100 persen
6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 laporan	26 laporan
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	60 persen	60 persen
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu	100 persen	100 persen
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	2 rekomendasi
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase jumlah PD yang nilai SAKIPnya meningkat; Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev	16,67 persen; 25 persen	96 persen; 29 persen
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 perangkat daerah	16 perangkat daerah
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	26 laporan	30 laporan

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	INDIKATOR	
		TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
INSPEKTORAT			
Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah

Tabel 2.23
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2024

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.0.00.0.00.24.0000	Inspektorat Daerah	8,938,630,396	4,316,282,346	48,29%	62,27%	57,53%
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH					
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,000,000	6,398,511	45,70%	49,79%	70,00%
2	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1,999,800	1,352,050	67,61%	100,00%	100,00%
3	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1,999,800	0	0,00%	100,00%	70,00%
4	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1,240,000	0	0,00%	0,00%	50,00%
5	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1,240,000	0	0,00%	0,00%	10,00%
6	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,000,000	25,549,816	73,00%	75,19%	76,00%
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,965,017,876	3,491,776,420	50,13%	65,50%	60,00%
8	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,700,000	2,619,000	45,95%	48,36%	55,00%
9	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	1,894,600	94,73%	100,00%	100,00%
10	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,999,800	0	0,00%	0,00%	50,00%
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
11	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan	4,999,000	2,370,350	47,42%	49,80%	54,00%

RENCANA KERJA 2025

		Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
12	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,995,000	1,376,500	15,30%	33,35%	50,00%
13	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,000,000	4,823,000	32,15%	43,33%	60,00%
14	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,999,800	8,577,100	47,65%	48,33%	50,00%
15	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14,997,500	6,477,105	43,19%	60,01%	62,00%
16	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13,992,000	4,325,000	30,91%	42,88%	50,00%
17	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,912,000	89,959,078	58,45%	58,47%	60,00%
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
18	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	3,147,750	26,23%	34,82%	55,00%
19	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159,369,600	53,973,250	33,87%	48,11%	55,00%
20	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,233,880	30,031,900	49,86%	60,00%	62,00%
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
21	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115,727,400	20,724,791	17,91%	38,14%	60,00%
22	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129,667,300	49,570,748	38,23%	47,43%	50,00%
23	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2,500,000	0	0,00%	20,00%	0,00%
24	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,990,000	9,672,000	43,98%	54,83%	60,00%
25	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,993,540	0	0,00%	0,00%	50,00%
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
26	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	89,204,000	28,559,811	32,02%	39,57%	55,00%
27	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	17,926,400	5,929,500	33,08%	53,49%	55,00%
28	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	32,993,900	16,167,700	49,00%	48,43%	50,00%
29	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	45,997,100	28,912,712	62,86%	56,48%	63,00%
30	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	89,999,300	29,922,750	33,25%	45,56%	50,00%
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
31	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	53,949,300	15,876,750	29,43%	50,82%	55,00%

	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan					
32	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4,999,700	1,895,400	37,91%	84,05%	84,00%
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					
33	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32,876,900	12,164,500	37,00%	48,67%	50,00%
34	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	439,347,800	205,142,959	46,69%	55,99%	60,00%
35	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	299,761,700	131,511,345	43,87%	48,81%	70,00%
36	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	60,000,000	25,579,950	42,63%	55,78%	60,00%
	TOTAL		8,938,630,396	4,316,282,346	48,29%	62,27%	57,53%

Tabel 2.24
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.0.00.0.00.24.0000	Inspektorat	7.415.582.878	6.948.577.468	93,70%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.239.400	4.156.850	98,05%	100,00%	100,00%
2	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.760.000	2.750.400	99,65%	100,00%	100,00%
3	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.760.000	2.750.950	99,67%	100,00%	100,00%
4	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01 .	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.240.000	1.234.600	99,56%	100,00%	100,00%

RENCANA KERJA 2025

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.04						
5	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.240.000	1.234.600	99,56%	100,00%	100,00%
6	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.549.900	6.527.600	99,66%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.653.071.858	5.366.795.309	94,94%	100,00%	100,00%
8	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.700.000	5.612.000	98,46%	100,00%	100,00%
9	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.620.000	1.609.900	99,38%	100,00%	100,00%
10	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.992.300	99,62%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
11	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.05 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.601.800	4.559.950	99,09%	100,00%	100,00%

RENCANA KERJA 2025

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2.05.03						
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
12	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.665.800	8.657.220	99,90%	100,00%	100,00%
13	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.679.300	15.593.586	99,45%	100,00%	100,00%
14	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.723.800	17.702.300	99,88%	100,00%	100,00%
15	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.927.400	13.916.330	99,92%	100,00%	100,00%
16	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000	13.679.275	99,99%	100,00%	100,00%
17	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.194.000	140.103.189	97,84%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
18	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.581.900	11.560.300	99,81%	100,00%	100,00%

RENCANA KERJA 2025

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.2.08.01						
19	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.997.120	104.451.693	74,08%	100,00%	100,00%
20	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.110.650	67.642.006	93,80%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
21	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.625.000	71.582.942	76,46%	100,00%	100,00%
22	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.072.000	111.021.101	90,21%	100,00%	100,00%
23	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	2.925.000	97,50%	100,00%	100,00%
24	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.711.500	23.610.000	99,57%	100,00%	100,00%
25	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.999.500	10.996.600	99,97%	100,00%	100,00%
26	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	275.000	238.650	86,78%	100,00%	100,00%

RENCANA KERJA 2025

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.11	Lainnya					
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
27	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	54.576.800	41.546.648	76,13%	100,00%	100,00%
28	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	11.150.500	10.694.366	95,91%	100,00%	100,00%
29	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	23.732.000	18.826.100	79,33%	100,00%	100,00%
30	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	20.554.000	20.354.100	99,03%	100,00%	100,00%
31	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80.480.900	79.852.500	99,22%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
32	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.02 . 6.01.02.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25.402.000	22.488.000	88,53%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 06.01.03 . 6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					

RENCANA KERJA 2025

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
33	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.03 . 6.01.03.2.01 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.445.800	4.052.500	91,15%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.03 . 6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					
34	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24.528.000	21.540.650	87,82%	100,00%	100,00%
35	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	351.490.900	318.434.086	90,60%	100,00%	100,00%
36	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	284.098.000	264.979.767	93,27%	100,00%	100,00%
37	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	57.643.800	43.593.850	75,63%	100,00%	100,00%
	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
38	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.07 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	38.185.700	29.370.250	76,91%	100,00%	100,00%
39	1 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 .06.01.01 . 6.01.01.2.07 . 6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.268.550	59.940.000	97,83%	100,00%	100,00%

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL		7.415.582.878	6.948.577.468	93,70%	100,00%	100,00%

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2023 antara lain :

- 1) Beberapa indikator dan target kinerja sasaran belum memenuhi kriteria SMART;
- 2) Masih diperlukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM terkait dengan Manajemen Risiko secara menyeluruh; perlu pembangunan budaya risiko secara masif agar seluruh tingkatan pegawai memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan Manajemen Risiko secara efektif; belum ada laporan tertulis kepada atasan selaku pemberi delegasi wewenang; belum terdapat evaluasi atas kebijakan pengelolaan SDM secara berkala;
- 3) Masih terdapat outcome pada level sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, program, kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya; dan masih terdapat temuan berulang terkait asset;
- 4) Hasil Penilaian Mandiri atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Magelang belum seluruh perangkat daerah menyusun SOP mencakup cegah, deteksi, dan respon; SOP seperangkat sistem antikorupsi belum direviu dan dievaluasi secara berkala; eksistensi dan efektivitas implementasi kebijakan antikorupsi belum dilakukan reviu dan evaluasi secara formal dan terjadwal; serta baru sebagian OPD yang melakukan penilaian risiko kecurangan yang dimulai dari identifikasi, analisis, penyusunan rencana mitigasi dan pelaksanaan tindak lanjutnya.
- 5) Target Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal pada indikator kinerja tujuan belum menyesuaikan target sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena belum adanya perubahan RPJMD dan hasil Evaluasi dari Kemenpan dan RB belum terbit;
- 6) Seluruh pegawai belum memahami dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja;
- 7) Penggunaan SMART Magelang sebagai alat pengukuran capaian kinerja belum optimal;
- 8) Belum optimalnya laporan reviu hasil internal OPD untuk menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

- 9) Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
- 10) Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu Kebutuhan utama.
- 11) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah. Pelaksanaan pengawasan APIP selama ini terdapat beberapa kegiatan/tugas mandatory yang belum seluruhnya dilaksanakan, hambatan utama karena keterbatasan anggaran dan jumlah auditor, sehingga harus memilah kegiatan yang menjadi prioritas khusus.
- 12) Pada proses pemantauan tindak lanjut entitas atau obyek pemeriksaan tidak memahami tentang aturan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terlambatnya proses penyelesaian tindak lanjut. Disamping itu penyelesaian temuan terkait dengan asset membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.
- 13) Penanganan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah sangat beragam sehingga untuk melakukan pendalaman dibutuhkan pengetahuan khusus, seperti investigasi ataupun manajemen fraud khususnya untuk penanganan kerugian daerah dimana sarana penunjang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut menjadi prioritas untuk difasilitasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya lingkungan pengendalian, belum semua entitas mendapatkan pendampingan dan asistensi
 - a. Saran perbaikan hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja oleh OPD
 - b. Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi
 - c. Belum optimalnya OPD dalam mengidentifikasi penilaian resiko

- d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas
- 2. Belum maksimalnya kualitas pengawasan pada OPD, belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat
 - a. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan di entitas
 - b. Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
 - c. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners untuk peningkatan Nilai SAKIP Komponen evaluasi Internal;
2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Magelang.

2.3.1 Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsinya tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah

Inspektorat sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Magelang. Struktur Organisasi Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Kota Magelang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang di pimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Fokus pemeriksaam yang selalu berganti dan semakin mendalam;
- b. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan terutama dalam keterampilan teknologi informasi;
- c. Sumber Daya Manusia yang cenderung berkurang secara kuantitas dari tahun pertahun dapat mengakibatkan beban kerja yang diampu sangat tinggi serta latar belakang Pendidikan yang tidak sesuai beban kinerja;

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016–2021, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu “Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- 1) MISI I Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi

pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) MISI 2 Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
- 3) MISI 3 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) MISI 4 Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang
- 5) MISI 5 Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Inspektorat Daerah Kota Magelang yang menyelenggarakan urusan pengawasan, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sesuai dengan Misi Walikota Magelang yang ke-3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif”. Tujuan misi ketiga ini adalah: “Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif”, dengan sasaran yang akan dicapai pada Inspektorat Daerah Kota Magelang dalam membantu mewujudkan misi tersebut adalah menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal ini selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang diharapkan pada Tahun 2025 telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan dalam peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah terdapat beberapa tantangan dan peluang yang dapat dijadikan salah satu perumusan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Semakin banyaknya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting.
- 2) Semakin meningkatnya target kinerja pengawasan dan keuangan.
- 3) APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.
- 4) Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.

- 5) Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM Pengawasan.
Sedangkan peluang yang ada, antara lain:
- 1) Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
 - 2) Adanya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
 - 3) Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan
 - 4) Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 5) Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;
 - 6) Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2025

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam fungsi pengawasan. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah melalui :
 1. Penerapan Fraud Management System dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
 2. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
 3. Pencegahan dan penindakan praktik fraud.
 4. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
 5. Penguatan budaya integritas melalui penerapan Integrity Framework (perbaikan sistem, edukasi/kampanye dan penindakan)
 6. Pengelolaan SDM yang Optimal dalam rangka mewujudkan SDM yang Adaptif dan Technology Savvy (mengerti teknologi)
 7. Pengembangan SDM Pengawasan
 8. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern

Perumusan arah kebijakan sebagai formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan diantaranya:

1. Pemenuhan Kebutuhan SDM pengawasan dengan kebijakan Rekrutmen dan impassing.
2. Penguatan system dan struktur pengawasan.
3. Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan yang berkualitas dengan diklat/pelatihan/bintek.
4. Pengawasan reformasi birokrasi dan budaya integritas.
5. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, telah dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Rancangan awal RKPD dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada Inspektorat Daerah terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.25
 Reviu Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Daerah
 Kota Magelang Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
INSPEKTORAT				Rp 14.436.756.946		Rp 14.436.756.946		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	100 persen	Rp 10.437.700.946	100 persen	Rp 10.437.700.946		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 persen	Rp 74.260.400	100 persen	Rp 74.260.400	Rp -	0%
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	Rp 29.919.900	10 dokumen	Rp 29.919.900	Rp -	0%
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 1.999.800	1 dokumen	Rp 1.999.800	Rp -	0%
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 1.999.800	1 dokumen	Rp 1.999.800	Rp -	0%

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 1.999.800	1 dokumen	Rp 1.999.800	Rp -	0%
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Rp 36.341.100	2 laporan	Rp 36.341.100	Rp -	0%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan	100 persen	Rp 8.265.973.677	100 persen	Rp 8.265.973.677	Rp -	0%
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 org/bln	Rp 8.256.226.477	32 org/bln	Rp 8.256.226.477	Rp -	0%
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 5.677.700	12 dokumen	Rp 5.677.700	Rp -	0%
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp 2.069.800	1 laporan	Rp 2.069.800	Rp -	0%

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Rp 1.999.700	1 dokumen	Rp 1.999.700	Rp -	0%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	Rp 15.713.900	100 persen	Rp 15.713.900	Rp -	0%
6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	Rp 15.713.900	2 dokumen	Rp 15.713.900	Rp -	0%
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Rp 232.407.000	100 persen	Rp 232.407.000	Rp -	0%
6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	Rp 9.753.100	10 paket	Rp 9.753.100	Rp -	0%
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Rp 15.799.100	12 paket	Rp 15.799.100	Rp -	0%
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Rp 17.999.900	12 paket	Rp 17.999.900	Rp -	0%
6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Rp 14.996.900	12 paket	Rp 14.996.900	Rp -	0%
6.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 13.950.000	12 laporan	Rp 13.950.000	Rp -	0%

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 159.908.000	12 laporan	Rp 159.908.000	Rp -	0%
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Rp 1.306.627.700	100 persen	Rp 1.306.627.700	Rp -	0%
6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp 295.422.700	1 unit	Rp 295.422.700	Rp -	0%
6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah paket Mebel yang disediakan	25 unit	Rp 267.004.800	25 unit	Rp 267.004.800	Rp -	0%
6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 unit	Rp 744.200.200	66 unit	Rp 744.200.200	Rp -	0%
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Rp 254.972.989	100 persen	Rp 254.972.989	Rp -	0%
6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp 19.314.900	12 laporan	Rp 19.314.900	Rp -	0%
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 161.369.600	12 laporan	Rp 161.369.600	Rp -	0%

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 74.288.489	12 laporan	Rp 74.288.489	Rp -	0%
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Rp 287.745.280	100 persen	Rp 287.745.280	Rp -	0%
6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	Rp 119.696.400	7 unit	Rp 119.696.400	Rp -	0%
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Rp 131.640.100	15 unit	Rp 131.640.100	Rp -	0%
6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	Rp 3.750.000	5 unit	Rp 3.750.000	Rp -	0%
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	Rp 22.990.000	32 unit	Rp 22.990.000	Rp -	0%
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp 9.668.780	1 unit	Rp 9.668.780	Rp -	0%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	96 persen	Rp 844.248.700	96 persen	Rp 844.248.700		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Magelang	Persentase Entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	96 persen	Rp 667.716.700	96 persen	Rp 667.716.700	Rp -	0%
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 laporan	Rp 158.252.800	34 laporan	Rp 158.252.800	Rp -	0%
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 laporan	Rp 91.845.700	7 laporan	Rp 91.845.700	Rp -	0%
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 laporan	Rp 46.605.400	25 laporan	Rp 46.605.400	Rp -	0%
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	29 laporan	Rp 69.931.700	29 laporan	Rp 69.931.700	Rp -	0%
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	Rp 301.081.100	12 dokumen	Rp 301.081.100	Rp -	0%
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	Persentase laporan penyelenggaraan PDDT yang tepat waktu	95 persen	Rp 176.532.000	95 persen	Rp 176.532.000	Rp -	0%
6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 laporan	Rp 176.532.000	25 laporan	Rp 176.532.000	Rp -	0%
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan asistensi	85 persen	Rp 3.154.807.300	85 persen	Rp 3.154.807.300		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu	100 persen	Rp 37.711.700	100 persen	Rp 37.711.700	Rp -	0%
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	Rp 37.711.700	2 rekomendasi	Rp 37.711.700	Rp -	0%
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kota Magelang	Persentase jumlah PD yang nilai SAKIPnya meningkat; Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev	16,67 persen; 25 persen	Rp 3.117.095.600	16,67 persen; 25 persen	Rp 3.117.095.600	Rp -	0%
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 perangkat daerah	Rp 40.758.400	11 perangkat daerah	Rp 40.758.400	Rp -	0%
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 perangkat daerah	Rp 878.726.600	30 perangkat daerah	Rp 878.726.600	Rp -	0%
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	26 laporan	Rp 2.111.168.000	26 laporan	Rp 2.111.168.000	Rp -	0%
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Magelang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 perangkat daerah	Rp 86.442.600	30 perangkat daerah	Rp 86.442.600	Rp -	0%

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021, Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja akuntabilitas kinerja dan keuangan, good governance, clean government dan pelayanan publik, serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya. Inspektorat Daerah akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat dan kondisi peraturan perundang-undangan jika mengalami perubahan dengan mengurangi ataupun menambah kegiatan yang sudah ada. Di tahun ini, Inspektorat daerah tidak menambah kegiatan.

Tabel 2.26
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Magelang Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Inspektorat Jenderal melaksanakan visi Kementerian Dalam Negeri, yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang diinternalisasikan di lingkungan Inspektorat Jenderal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Inspektorat Jenderal ke depan mampu memposisikan sebagai Instansi yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku coordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Inspektorat Jenderal melaksanakan Misi Kementerian Dalam Negeri, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan

berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
- 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dijelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025). Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: "Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik". Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP dan tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk ;

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi;
- 2) Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang;
- 3) Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur;
- 4) Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan;
- 5) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya.

Dalam Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

Analisis Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	Isu Strategis
➤ Isu Global TPB	Tujuan 16; Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Tujuan17; Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
➤ Isu Global Pandemi Covid-19	Pemanfaatan teknologi informasi
➤ Isu Nasional RPJMN 2020-2024	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
➤ Isu Regional, Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
➤ Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
➤ Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
➤ RTRW Kota Magelang 2011-2031	-
➤ Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Reformasi birokrasi
➤ Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026	Reformasi birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang dirumuskan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai atau yang dihasilkan yang dianggap mampu mendukung upaya pencapaian visi misi Inspektorat dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam RENSTRA 2021-2016, Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada penjabaran Misi Ketiga RPJMD Kota Magelang yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif”. Adapun Tujuan Inspektorat Kota Magelang dalam Renstra Inspektorat Kota Magelang adalah “Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat telah menetapkan 2 sasaran strategis yaitu:

1. Peningkatan nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal;
2. Peningkatan Maturitas SPIP;

Dalam mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator Inspektorat Kota Magelang yaitu;

1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal
2. Maturitas SPIP

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan telah dijabarkan pada telaahan Terhadap Kebijakan Nasional serta rumusan tujuan dan sasaran OPD. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang pada tahun 2025 sesuai dengan hasil telaah dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah adalah;

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP
 - 6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 - 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
 - 6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
 - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja
 - 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan
 - 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
 - 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasan

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi

6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2025 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga tetap harus mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026. Berikut ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator yang ditetapkan dalam rangka mendukung visi misi Walikota Magelang;

TABEL 4.1

Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif				
Tujuan: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif				
1.	Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka Angka	3,921 8,3
	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat Kapabilitas APIP	Angka Angka	83 3,3
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Angka	93

4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2025

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju							
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target Capaian
		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Dana	
INSPEKTORAT			Rp 14.436.756.946		Rp 14.436.756.946		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 persen	Rp 10.437.700.946	100 persen	Rp 10.437.700.946		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	100 persen	Rp 74.260.400	100 persen	Rp 74.260.400	DAU	100%
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	10 dokumen	Rp 29.919.900	10 dokumen	Rp 29.919.900	DAU	100%
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 1.999.800	1 dokumen	Rp 1.999.800	DAU	100%
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 1.999.800	1 dokumen	Rp 1.999.800	DAU	100%
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	DAU	100%
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 1.999.800	1 dokumen	Rp 1.999.800	DAU	100%
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kota Magelang	2 laporan	Rp 36.341.100	2 laporan	Rp 36.341.100	DAU	100%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	100 persen	Rp 8.265.973.677	100 persen	Rp 8.265.973.677	DAU	100%
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kota Magelang	32 org/bln	Rp 8.256.226.477	32 org/bln	Rp 8.256.226.477	DAU	100%
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Inspektorat Kota Magelang	12 dokumen	Rp 5.677.700	12 dokumen	Rp 5.677.700	DAU	100%
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Kota Magelang	1 laporan	Rp 2.069.800	1 laporan	Rp 2.069.800	DAU	100%
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat Kota Magelang	1 dokumen	Rp 1.999.700	1 dokumen	Rp 1.999.700	DAU	100%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Kota	100 persen	Rp 15.713.900	100 persen	Rp 15.713.900	DAU	100%

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju							
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target Capaian
		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Dana	
	Magelang						
6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Kota Magelang	2 dokumen	Rp 15.713.900	2 dokumen	Rp 15.713.900	DAU	100%
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Magelang	100 persen	Rp 232.407.000	100 persen	Rp 232.407.000	DAU	100%
6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kota Magelang	10 paket	Rp 9.753.100	10 paket	Rp 9.753.100	DAU	100%
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kota Magelang	12 paket	Rp 15.799.100	12 paket	Rp 15.799.100	DAU	100%
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Kota Magelang	12 paket	Rp 17.999.900	12 paket	Rp 17.999.900	DAU	100%
6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Inspektorat Kota Magelang	12 paket	Rp 14.996.900	12 paket	Rp 14.996.900	DAU	100%
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp 13.950.000	12 laporan	Rp 13.950.000	DAU	100%
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp 159.908.000	12 laporan	Rp 159.908.000	DAU	100%
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	100 persen	Rp 1.306.627.700	100 persen	Rp 1.306.627.700	DAU	100%
6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	1 unit	Rp 295.422.700	1 unit	Rp 295.422.700	DAU	100%
6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	25 unit	Rp 267.004.800	25 unit	Rp 267.004.800	DAU	100%
6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	66 unit	Rp 744.200.200	66 unit	Rp 744.200.200	DAU	100%
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	100 persen	Rp 254.972.989	100 persen	Rp 254.972.989	DAU	100%
6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp 19.314.900	12 laporan	Rp 19.314.900	DAU	100%
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kota Magelang	12 laporan	Rp 161.369.600	12 laporan	Rp 161.369.600	DAU	100%
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Inspektorat Kota	12 laporan	Rp 74.288.489	12 laporan	Rp 74.288.489	DAU	100%

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju							
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target Capaian
		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Dana	
	Kantor	Magelang					
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	100 persen	Rp 287.745.280	100 persen	Rp 287.745.280	DAU	100%
6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat Kota Magelang	7 unit	Rp 119.696.400	7 unit	Rp 119.696.400	DAU	100%
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Kota Magelang	15 unit	Rp 131.640.100	15 unit	Rp 131.640.100	DAU	100%
6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Kota Magelang	5 unit	Rp 3.750.000	5 unit	Rp 3.750.000	DAU	100%
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	32 unit	Rp 22.990.000	32 unit	Rp 22.990.000	DAU	100%
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Kota Magelang	1 unit	Rp 9.668.780	1 unit	Rp 9.668.780	DAU	100%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		96 persen	Rp 844.248.700	96 persen	Rp 844.248.700		
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Kota Magelang	96 persen	Rp 667.716.700	96 persen	Rp 667.716.700	DAU	100%
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	34 laporan	Rp 158.252.800	34 laporan	Rp 158.252.800	DAU	100%
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota Magelang	7 laporan	Rp 91.845.700	7 laporan	Rp 91.845.700	DAU	100%
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Kota Magelang	25 laporan	Rp 46.605.400	25 laporan	Rp 46.605.400	DAU	100%
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Kota Magelang	29 laporan	Rp 69.931.700	29 laporan	Rp 69.931.700	DAU	100%
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Kota Magelang	12 dokumen	Rp 301.081.100	12 dokumen	Rp 301.081.100	DAU	100%
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota Magelang	95 persen	Rp 176.532.000	95 persen	Rp 176.532.000	DAU	100%
6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kota	25 laporan	Rp 176.532.000	25 laporan	Rp 176.532.000	DAU	100%

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju							
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target Capaian
		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Dana	
	Magelang						
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		85 persen	Rp 3.154.807.300	85 persen	Rp 3.154.807.300		
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	100 persen	Rp 37.711.700	100 persen	Rp 37.711.700	DAU	100%
6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Kota Magelang	2 rekomendasi	Rp 37.711.700	2 rekomendasi	Rp 37.711.700	DAU	100%
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Kota Magelang	16,67 persen; 25 persen	Rp 3.117.095.600	16,67 persen; 25 persen	Rp 3.117.095.600	DAU	100%
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kota Magelang	11 perangkat daerah	Rp 40.758.400	11 perangkat daerah	Rp 40.758.400	DAU	100%
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Magelang	30 perangkat daerah	Rp 878.726.600	30 perangkat daerah	Rp 878.726.600	DAU	100%
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kota Magelang	26 laporan	Rp 2.111.168.000	26 laporan	Rp 2.111.168.000	DAU	100%
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kota Magelang	30 perangkat daerah	Rp 86.442.600	30 perangkat daerah	Rp 86.442.600	DAU	100%

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat. Kaidah Pelaksanaan Inspektorat Daerah sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan resiko OPD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing OPD yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih sehingga dapat mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kota Magelang.

Rencana Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah:

1. Melaksanakan peningkatan pemahaman personil dalam menyusun indikator dan target dalam dokumen perencanaan sehingga mencukupi dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achieveable, relevant, time bond) untuk mengukur sasaran
2. Melaksanakan peningkatan Komponen Struktur dan Proses atas SPIP, MRI dan IEPK melalui peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM terkait dengan Manajemen Resiko
3. Mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP
4. Melakukan evaluasi terhadap pedoman evaluasi internal SAKIP.
5. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan karena Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk

- dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
 7. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan;
 8. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
 9. Pemenuhan dan Penguatan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara kualitas dan kuantitas;
 10. Upaya APIP dalam pemantauan tindak lanjut adalah sedini mungkin memberikan penjelasan bagi obyek pemeriksaan tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
 11. Mengupayakan sedini mungkin untuk menyelesaikan sisa temuan dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan belum selesai;
 12. Mendampingi obyek pemeriksaan dalam setiap langkah penyelesaian tindaklanjut agar proses penyelesaian dapat terpantau dengan baik dan terlaksana tepat waktu sesuai rencana aksi yang telah disepakati;
 13. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan;
 14. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang;

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Magelang, 5 Agustus 2024
INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG



LARSITA S.E., M.Sc. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199003 1 008



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana perangkat daerah dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung rencana perangkat daerah diperlukan adanya dokumen rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Daftar pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2025

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	127,273,947,629.00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	354,837,155,337.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	76,409,935,179.00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	23,455,074,706.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12,468,649,271.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	4,842,786,611.00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	13,527,624,400.00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	10,528,484,461.00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	31,756,552,717.00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	6,207,709,428.00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	9,921,311,240.00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	16,756,697,611.00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	16,313,193,050.00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	6,032,437,085.00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	15,413,462,168.00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	7,065,394,411.00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9,253,223,143.00
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang	19,270,990,015.00
19	Sekretariat Daerah Kota Magelang	40,570,167,100.00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	31,307,000,729.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang	9,526,367,877.00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	24,152,237,256.00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	28,415,527,906.00
24	Inspektorat Daerah Kota Magelang	14,436,756,946.00
25	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	23,748,471,369.00

26	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	27,715,477,060.00
27	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	22,850,091,112.00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	8,776,650,717.00
	TOTAL	992,833,376,534.00

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

